
**EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
(UPPO) DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**

Moureen Veronica Priyono¹, Evi Satispi²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyaluran program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut, hasil dari program UPPO petani sangat terbantu karena kualitas dan produktifitas yang meningkat, begitu pula dengan biaya produksi yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program UPPO masih ditemukannya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang meminta persenan dari jumlah bantuan yang di salurkan kepada para petani di Kabupaten Simalungun. Dan Faktor Pendukung : Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Perhatian pemerintah terhadap pertanian. Faktor Penghambat : Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab. Kurangnya ketegasan hukum.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Bantuan Pengembangan Unit

PENDAHULUAN

Kebutuhan pupuk nasional hampir sama dengan jumlah produksi yang ditargetkan Pupuk Indonesia tahun ini sebesar 13 juta ton. Sesuai Permentan Nomor 69 Tahun 2016, pupuk bersubsidi tahun anggaran 2017 dialokasikan sebanyak 8,55 juta ton. Pupuk subsidi pasti terserap dan menyisakan gap yang bisa menjadi kesempatan bagi Pupuk Indonesia meraup untung lebih sehingga dapat menyiapkan strategi ekspansi bisa meraup keuntungan dari bisnis pupuk nonsubsidi, di samping juga kewajiban kita memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jumlah stok pupuk di lini I hingga IV untuk Urea sebesar 862.363 ton, stok NPK sebesar 299.852 ton, stok SP-36 sebesar 122.554 ton, ZA sebesar 124.443 ton dan organik sebesar 82.344 ton. Dari segi konsumsi pupuk, sektor pertanian merupakan pengguna pupuk urea dengan porsi terbesar yaitu 4.10 Juta Ton dibandingkan sektor perkebunan yaitu sebesar 1.01 Juta Ton. Kebutuhan pupuk urea yang tergolong besar, selain menjadi faktor yang sangat dibutuhkan oleh petani, pupuk urea juga menjadi bahan baku dalam beberapa industri. Pupuk urea dalam industri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri perekat kayu lapis, industri farmasi, kosmetika, dan industri plastik (PT PUSRI, 2018).

Pelaksanaan kegiatan UPPO tahun 2016 di Dinas Pertanian Kabupaten Simulungan berbeda dari tahun sebelumnya yang semula merupakan Bantuan Sosial menjadi Bantuan Pemerintah. Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016 serta Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2016).

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara

selama Januari hingga Maret atau triwulan I-2018 sudah mencapai 101.438,15 ton untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura. Realisasi itu lebih besar dari alokasi untuk Januari – Maret yang sebesar 78.646 ton. Penyaluran yang besar itu karena permintaan yang banyak di Kabupaten Simulungan dampak masih di musim tanam yakni di periode Oktober 2017 – Maret 2018. Realisasi penyaluran pupuk itu masing – masing, urea sebanyak 31.936 ton, ZA 8.798 ton, SP36 10.049 ton, NPK 22.830 ton dan organik 4.986 ton. Sesuai ketentuan, harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi itu masing urea Rp1.800, SP36 Rp 2.000, NPK Rp2.300 dan organik Rp500 per kg. Sserapan pupuk tertinggi ada di Kabupaten Simalungun, Dairi, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Deliserdang. Alokasi bantuan kebutuhan pupuk tahun anggaran 2018 itu lebih rendah dari 2017 yang sebesar 385.434 ton karena disesuaikan dengan permintaan atau serapan.

Dimana ada dana hibah dan bantuan sosial, orang- orang tertentu membuat kelompok memanfaatkan orang yang awam termasuk orang – orang dinas, untuk mengejar bantuan sosial turun, sementara kelompok tidak di bentuk dengan kriteria kelompok kerja. Alhasil mereka akan berkecimpung pada kegiatan mereka di bidangnya masing - masing. Dan banyak pula alasan - alasan lain yang terjadi di lapangan. Proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena masalah sesuai pengamatan peneliti mengenai penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Desa Panombean Panei Kabupaten Simalungun.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisa keberhasilan program bantuan pupuk di Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyaluran hibah pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dalam rangka produktivitas sawah dan kesejahteraan petani.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara/ Interview, Dokumentasi. Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data, mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. dan berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitas bantuan UPPO yang diberikan pemerintah tersebut, pemerintah berharap bahwa para petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara insitu.

Maka dari itu setelah berlakunya program bantuan UPPO perlu di evaluasi untuk mendapatkan hal yang maksimal, dan dengan dilakukannya evaluasi dapat diketahui apakah dengan adanya bantuan dari pemerintah akan berdampak positif kepada petani dan juga hasil/kualitas produktifitas dari petani itu sendiri.

Maka dari itu berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit PengolahPupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan menggunakan teori CIPP.

a. Context

Context Evaluation (Evaluasi Konteks) diartikan sebagai latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang dilakukan. Stufflebeam dalam Hamid Hasan menyebutkan, tujuan dari evaluasi konteks

yang utama adalah untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi, sehingga dapat diberikan alasan perbaikan yang dibutuhkan. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.

Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial tahun 2016 Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ditemukan beberapa masalah, antara lain:

1. Penyaluran bantuan hibah pupuk di setiap petani tidak sesuai anjuran untuk pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah sebanyak 250 kg/ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg/ha.
2. Tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan Departemen Pertanian yang merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu melebihi dari yang dialokasikan.
3. Tidak adanya ketidakdisiplinan petani dalam menentukan pola tanam. Sebagai contoh, pada daerah Desa Panombean Panei yang biasanya menanam padi dua kali, ketika begitu masih ada persediaan air yang mencukupi pada gardu dua (MK II) petani pada umumnya menanam padi lagi, sehingga terjadi lonjakan permintaan pupuk.
4. Sosialisasi program bantuan pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kurang optimal, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan penerima bantuan dirasakan masih sangat kurang. Hal ini diakibatkan oleh adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat khususnya mengenai pembagian bantuan UPPO, dana bantuan tersebut terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme.

-
5. Kebutuhan pupuk pada tanaman hortikultura juga sangat sulit untuk dihitung, mengingat jenis komoditas yang ditanam petani tidak pasti dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pasar.

Tujuan kebijakan program bantuan pupuk oleh Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), pada intinya untuk kesejahteraan petani serta kesinambungan usaha taninya, masih terhambat pada ketidaktepatan lima kendala di atas, serta masih adanya sistem distribusi pupuk yang masih belum teratur dan konsisten.

Berdasarkan hasil Wawancara, Observasi dan Dokumentasi maka dapat diperoleh hasil bahwa evaluasi konteks bantuan program UPPO sudah berjalan dengan cukup baik, mulai dari bagaimana tujuan dari program UPPO itu sendiri dan hasil yang diperoleh oleh para petani. Tujuan dari program UPPO juga dicapai melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan saat dilakukannya pertemuan dengan kelompok-kelompok petani.

b. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Input Evaluation pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses dengan hasil program. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Pemberian bantuan dari pemerintah kerap di kelilingi oleh oknum-oknum pemerintahan yang nakal dan tidak bertanggung jawab, dengan adanya oknum tersebut sangat merugikan masyarakat yang harusnya menerima bantuan itu secara penuh.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat dikatakan evaluasi input program UPPO sudah berjalan, masukan-masukan pun sudah ditampung melalui koordinator lapangan dan bukan hanya menampung keluhan-keluhan para petani saja, tetapi juga diadakan pelatihan-pelatihan. Penggunaan pupuk organik juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan produktifitas petani, yang dimana semenjak

menggunakan pupuk organik petani merasa terjadinya peningkatan.

c. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Process Evaluation ialah model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Berikut data Pupuk Bersubsidi dari tahun 2014-2019:

Gambar 1. Pupuk Bersubsidi

PUPUK BERSUBSIDI												
Jenis Pupuk	Realisasi Pupuk Bersubsidi											
	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)	Keuangan (Rp. Miliar)	Volume (Ribu Ton)
Urea	11,059.06	3,997.34	11,614.27	3,748.41	12,845.60	3,993.09	13,554.06	4,117.09	14,657.06	4,081.37	11,949.66	3,693.01
SP-36	2,512.89	797.56	2,685.26	811.13	2,642.88	869.75	2,121.30	843.75	2,676.48	843.74	2,216.19	772.32
ZA	1,815.01	974.22	1,893.65	959.26	1,716.01	1,010.61	1,498.99	958.56	1,878.92	990.13	1,471.90	968.58
NPK	8,952.04	2,375.85	10,694.93	2,447.30	11,318.52	2,659.22	9,320.72	2,523.42	10,817.96	2,651.28	8,755.10	2,308.72
Organik	1,033.60	742	1,068.62	782.56	991.82	673.09	993.18	687.36	1,174.57	721.08	1,012.03	741.63
Jumlah	25,372.60	8,886.81	27,956.72	8,748.67	29,514.83	9,205.76	27,488.26	9,130.18	31,204.98	9,287.59	25,404.88	8,484.26

Keterangan:

- Realisasi tahun 2014 - 2018 berdasarkan hasil audit BPK
- Penyerapan pupuk bersubsidi tidak pernah melebihi 9,3 juta ton

11

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Gambar 2. Data Alokasi Volume dan Anggaran Pupuk Subsidi Tahun 2020

No	Jenis Pupuk	Volume (Ton)	Subsidi Rp
1	UREA	3,274,303	11,348,344,555,943
2	SP36	500,000	1,658,239,500,000
3	ZA	750,000	1,349,169,000,000
4	NPK	2,705,000	11,128,911,000,000
5	ORGANIK	720,000	1,142,720,640,000
Total		7,949,303	26,627,384,695,943

Sumber: Kementerian Pertanian Tahun 2020

Gambar 3. Data Kurang Bayar Subsidi Pupuk

No	Tahun	Kurang Bayar		
		Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
1	2015	5,045,329,128,458	5,045,329,128,458	-
2	2016	2,939,751,206,345	2,939,751,206,345	-
3	2017	1,833,249,604,468	1,788,168,665,197	45,080,939,271
4	2018	5,712,863,662,940	-	5,712,863,662,940
	TOTAL	15,531,193,602,211	9,773,249,000,000	5,757,944,602,211

Sumber: Kementerian Pertanian, 2020

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka di dapatkan hasil bahwa evaluasi proses mulai dari proses mendapatkan bantuan program UPPO itu tidak begitu saja mendapatkan bantuan, karena ada syarat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan juga dalam mendapatkan bantuan para petani tidak dipungut biaya apapun, hanya saja mereka harus menyediakan lahan.

d. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Product Evaluation diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir atautkah ada keputusan lainnya. Dari hasil Wawancara mengenai apa saja hasil yang diharapkan dari program bantuan UPPO kepada para petani, informan pertama, kedua dan ketiga menjawab dengan jawaban yang hampir sama yaitu :

“hasil yang kami harapkan kepada para petani dengan adanya program ini yaa untuk memperbaiki kesuburan lahan mereka, meningkatkan produktifitas pertanian, berkurang nya pemakaian pupuk kimia, dan berkembangnya penggunaan pupuk organic, dan yang terutama lagi yaitu meningkatkan pendapatan para petani”

Pihak pemerintah berharap dengan adanya program bantuan ini para petani bisa lebih sejahtera hidupnya dan juga meningkatkan kualitas pertanian.

Gambar 4. Hasil Pupuk Organik



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka didapatkan hasil bahwa dengan adanya program bantuan pemerintah UPPO para petani merasakan sangat terbantu dan sangat merasakan dampak meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terdapat banyak hal yang menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan dalam Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan baik. Salah satunya dengan melihat faktor apa saja yang terjadi dalam Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara :

Faktor Pendukung

- a. Adanya anggaran dari pemerintah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan diolah.
- c. Perhatian pemerintah terhadap pertanian.

Faktor Penghambat

- a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya petani.
- b. Masih ada nya oknum pemerintah yang nakal dan tidak bertanggung jawab.
- c. Kurangnya ketegasan hukum.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang di analisis berdasarkan 4 indikator yaitu : Input, Context, Process dan Product. Bahwa berdasarkan keempat indikator yang sudah di jelaskan diatas,maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk di Kabupaten Simalungun sudahlah berhasil berjalan dengan baik, mulai dari bagaimana penyaluran bantuan itu kepada masyarakat/petani dan pelatihan pelatihan yang diberikan maupun peralatan yang diberikan guna membantu memudahkan petani dalam mengolah pertanian nya dan menghasilkan pupuk organik secara insitu. Tetapi dalam hal ini masih ditemukan nya permasalahan dalam penyaluran bantuan kepada petani yang dimana, para aparatur negara yang harusnya menjadi abdi masyarakat menyalahgunakan wewenang dan tidak bertanggung jawab dengan meminta persenan kepada kelompok petani saat dana bantuan itu cair, dan

mengancam para petani apabila mereka tidak mendapatkan persenan maka dana yang akan cair itu tidak akan diberikan, dengan adanya hal itu membuat kurangnya maksimalnya bantuan, karena petani yang harusnya bisa membeli sapi 2 dengan bantuan tersebut maka hanya bisa membeli 1 sapi.

b. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan maka dapat diketahui bahwa Evaluasi Program Pemberian Bantuan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dari Kementerian Pertanian Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih memerlukan perkembangan terkait program tersebut sebagai berikut:

1. Transaparansi penyaluran dana maupun alat alat yang diberikan pemerintah melalui program UPPO.
2. Butuh pengawasan yang lebih maksimal agar tidak terjadi lagi kecurangan, dari pihak pemerintah maupun petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro T. 2003. Pengembangan Pertanian Organik: Kasus Penerapan Pupuk Organik pada Padi Sawah di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Daymon, Christine & Immy Holloway. 2002. Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications. Terjemahan oleh Cahya Wiratma. 2008. Yogyakarta: Bentang.
- Joko Suryanto, dkk. (2010). Usaha Pembuatan Pupuk Organik Instan Siap Tabur dan Praktis sebagai Alternatif Pengganti Pupuk Kimiawi. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Malang.
- Made Pipik Sustriani, I Ketut Kirya, Fridayana Yudiaatmaja. (2014). Pengaruh Dana Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) terhadap Pendapatan Kelompok Ternak Ekasambada. Jurnal. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Manwan I, Ananto EE. 1994. Strategi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian tanaman pangan dalam: Ananto et al (eds). Prospek Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan. Puslit-bangtan, Badan Litbang Pertanian. p. 1-9, Tambunan H. Armansyah dan Sembiring E. Namaken; Kajian Kebijakan Alat dan Mesin Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Pl.130/5/2008, Tentang

Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa
Alat Dan Mesin Pertanian

- Rahmat dan Hediarto. 1998. Prosiding Prospektif Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian Dalam Peningkatan Daya Saing Komoditas. Pusat Penelitian Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Petani
- Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Stufflebeam, Daniel L., dan Anthony J. Shinkfield. 1986. Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing
- Tayibnapis, F.Y. (2000). Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta
- Yusuf, T. Farida. 2001. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Jakarta: Rineka Karya.
- Jurnal Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Dan Harga Pupuk Di Tingkat Petani oleh Benny Rachman, Analisis kebijakan pertanian, Vol.1 No.3 September 2003 : 221 237
- Peraturan Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) tahun 2010.